

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pengeluaran per Kapita

1. Pengertian Pengeluaran per Kapita

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi anggota rumah tangga pada periode tertentu.¹

Sedangkan menurut Muhamad Abdul Halim, mendefinisikan pengeluaran per kapita secara keseluruhan bagi anggota rumah tangga yang termasuk dalam satu rumah tangga yaitu dengan memakai pengertian pengeluaran konsumsi rumah tangga.² Jadi, Pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa kebutuhan hidup sehari-hari bagi anggota rumah tangga dalam suatu periode tertentu.

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Pengeluaran dan Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Banten 2016*, (Banten: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2016), h. 9.

² Muhamad Abdul Halim, *Teori Ekonomika Edisi 1*, (Tangerang: Jelajah Nusa, 2012), h. 47.

2. Pengeluaran Rumah Tangga per Kapita

Penghasilan rumah tangga atau uang masuk itu sebagian besar dibelanjakan lagi, yaitu untuk membeli segala hal yang diperlukan untuk hidup. Dalam ilmu ekonomi dikatakan: dibelanjakan untuk konsumsi. Konsumsi tidak hanya mengenai makanan saja, tetapi mencakup semua pemakaian barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Jumlah pengeluaran suatu rumah tangga tidak selalu sama besarnya, karena dari waktu ke waktu akan berkembang. Besarnya jumlah pengeluaran seluruh anggota keluarga tergantung dari banyak faktor seperti:³

- a. Besarnya jumlah penghasilan yang masuk
- b. Besarnya keluarga (jumlah anggota keluarga dan umurnya)
- c. Tingkat harga kebutuhan-kebutuhan hidup
- d. Taraf pendidikan keluarga dan status sosialnya.
- e. Lingkungan sosial ekonomis keluarga itu (misalnya tinggal di desa-di kota kecil-di kota besar- di Jakarta)

³ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro* (Yogyakarta: Penerbit Kansius, 1992), h. 63-64.

f. Kebijakan (atau ke-tidak-bijaksanaan) dalam mengelola dan mengendalikan keuangan keluarga

Bahwa dari semua hal tersebut di atas besar kecilnya penghasilan adalah faktor yang terpenting. Makin besar penghasilan keluarga, makin besar pula jumlah pengeluarannya; sebaliknya dari penghasilan yang kecil terpaksa pengeluaran juga akan harus kecil.

3. Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Konsumsi diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan jasa-jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi atau lebih tepatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita adalah pengeluaran oleh rumah tangga atas barang-barang akhir dan jasa.⁴ Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Dengan demikian, untuk mendapatkan asupan konsumsi yang sesuai kebutuhan sehari-hari anggota rumah tangga harus melakukan suatu usaha kegiatan yang menghasilkan pendapatan untuk dibelanjakan sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut.

⁴ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro* (Jakarta: Rajawali, 2012), h. 163.

Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang baik berasal dari pembelian, produksi sendiri maupun pembelian, dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.⁵ fokus pembahasan konsumsinya hanya pada segala apa yang dikonsumsi bagi anggota rumah tangga selain dari pada itu tidak masuk kedalam konsumsi /pengeluaran rumah tangga.

4. Pola Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pendapatan masyarakat menjadi faktor utama yang mempengaruhi pengeluaran per kapita. Hubungan keduanya bersifat positif, yaitu apabila pendapatan naik maka tingkat pengeluaran untuk konsumsi masyarakat pun bertambah. Hubungan keduanya dapat dirumuskan dalam fungsi matematis sebagai berikut:⁶

$$C = a + b Y$$

⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Pengeluaran dan Konsumsi*...h.9.

⁶ Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Banten: Koperasi Syariah Baraka, 2016), h. 42.

Dimana C adalah besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, a adalah besarnya konsumsi yang tidak tergantung pada jumlah pendapatan atau konsumsi jika tidak ada pendapatan, b adalah hasrat marginal masyarakat untuk melakukan konsumsi, Y adalah pendapatan disposable (pendapatan yang siap dikonsumsi).⁷

Dengan kemajuan dalam tingkat penghasilan, pola konsumsi juga berubah. Hal ini dapat dilihat dengan jelas, apabila pengeluaran-pengeluaran sejumlah keluarga digolong-golongkan menjadi beberapa kelompok, kemudian kita perbandingkan pengeluaran keluarga yang berpenghasilan rendah dengan pengeluaran keluarga yang tergolong cukup kaya. Maka terlihat bahwa terjadi suatu pergeseran dalam pengeluaran untuk konsumsi. Dalam keluarga yang miskin, hampir seluruh penghasilan akan habis untuk kebutuhan primer makanan. Jika tingkat penghasilan suatu keluarga naik maka jumlah pengeluaran uang untuk kebutuhan primer (khususnya makanan) juga akan bertambah banyak. Tetapi jika diperhatikan berapa

⁷ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.36.

persen dari penghasilan total yang dikeluarkan untuk berbagai kebutuhan, ternyata bahwa % penghasilan yang dibelanjakan untuk makanan akan berkurang, dari 80% menjadi 70, 60 atau 50%. Sebaliknya % atau bagian penghasilan yang dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain (perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dll.) bertambah besar, dari 20% menjadi 30 sampai 40 atau 50 %. Gejala ini dalam ilmu ekonomi dikenal dengan nama **Hukum Engel**.⁸

5. Penghitungan Pola Pengeluaran Biaya Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Untuk mengetahui angka yang menunjukkan berapa besar dari pendapatan regional Provinsi Banten tersebut yang digunakan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga, dapat menggunakan perhitungan *average propensity to consume* (APC)⁹

Dari data tersebut juga dihitung angka *marginal propensity to consume* (MPC) yaitu angka yang menunjukkan berapa besar

⁸ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu...* h. 64-65.

⁹ Nursiah Chalid, "Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Daerah Riau", *Jurnal: Ekonomi*, Vol. 18 No.1 (Maret, 2010) Fakultas Ekonomi Universitas Riau, h. 32-33.

pertambahan pengeluaran konsumsi rumah tangga akibat adanya pertambahan kenaikan pendapatan regional netto satu satuan uang (satu rupiah).

B. Konsep Indeks Pembangunan Manusia

1. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan tiga dimensi, yaitu: umur panjang dan sehat menggunakan ukuran harapan hidup pada saat lahir, pengetahuan sebagai ukurannya adalah kombinasi dari angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dan standar hidup layak menggunakan pengeluaran per kapita setahun disesuaikan sebagai ukuran.

Menurut UNDP dalam *Human Development Report 1991*, pembangunan manusia adalah suatu “proses meningkatkan pilihan yang lebih banyak bagi manusia untuk hidup (*a process of increasing people options*) atau proses peningkatan kemampuan manusia.¹⁰

¹⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten 2016*, (Banten: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2016), h. 9.

Pembangunan manusia sendiri adalah suatu konsep yang luas dan menyeluruh yang mearangkum kisaran luas potensi manusia mulai dari kesehatan dan gizi sampai kebebasan demokratis dan kualitas hidup yang sebagian besarnya sulit diterjemahkan ke dalam data statistik. Walaupun begitu, kita dapat melihat beberarapa indikasi dari data-data yang tersedia dan yang dapat dipergunakan untuk menghitung indeks pembangunan manusia Indonesia itu, yang memadukan ukuran usia harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan dalam satu angka tunggal.¹¹

Paradigma pembangunan manusia terdiri dari empat komponen yang utama:

- a. *Produktivitas*. Masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan ekonomi.

¹¹ BPS, Bappenas dan UNDP Indonesia, *Indonesia Laporan Pembangunan Manusia 2004 Ekonomi dari Demokrasi: Membiayai Pembangunan Manusia Indonesia Indonesia* (Jakarta: Naskah BPS, Bappenas, UNDP, 2004), h. 10.

- b. Ekuitas.* Masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini.
- c. Kesinambungan.* Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan-fisik, manusia, lingkungan hidup-harus dilengkapi.
- d. Pemberdayaan.* Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.¹²

Hakikat pembangunan adalah membentuk manusia-manusia atau individu-individu otonom, yang memungkinkan mereka dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang

¹² BPS, Bappenas dan UNDP Indonesia, *Indonesia Laporan...*h. 74.

dimilikinya secara optimal. Dari sini, muncul keberagaman dan spesialisasi sehingga menyuburkan pertukaran (*exchange*) atau transaksi. Inilah yang menjadi landasan kokoh bagi terwujudnya manusia-manusia unggulan sebagai modal utama terbentuknya daya saing nasional dalam menghadapi persaingan mondial. Transaksi tidak lain merupakan perwujudan dari interaksi antar manusia dengan segala keberagaman dan kelebihanannya masing-masing, adapun hasil dari transaksi atau interaksi tersebut adalah kesejahteraan social (*social welfare*), sebagaimana ditunjukkan oleh prinsip keunggulan komparatif (*comparative advantage*).¹³

2. Pengukuran Pembangunan Manusia

United National Development Program (UNDP) pada tahun 1990 telah menerbitkan *Human Development Report*. Hal yang menarik dari laporan tersebut adalah penyusunan dan perbaikan *Human Development Index* (HDI). Seperti PQLI, HDI mencoba *me-ranking* semua negara dalam skala 0 (sebagai tingkatan pembangunan manusia yang terendah) hingga tingkat 1 (tingkat

¹³ Faisal H Basri, *Perekonomian Indonesia, Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002), h. 112.

pembangunan manusia yang tertinggi) berdasarkan atas 3 tujuan atau produk pembangunan, yaitu:¹⁴

- a. Usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup.
- b. Pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca (diberi bobot dua pertiga) dan rata-rata tahun sekolah (diberi bobot sepertiga), dan
- c. Penghasilan yang diukur dengan pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan, yaitu disesuaikan menurut daya beli mata uang masing-masing negara dan asumsi menurunnya utilitas marginal penghasilan dengan cepat.

Dengan 3 ukuran pembangunan ini dan menerapkan suatu formula yang kompleks terhadap sekitar 160 negara, maka ranking HDI-nya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:¹⁵

- a. Negara dengan pembangunan manusia yang rendah bila dinilai HDI berkisar antara 0,0 hingga 0,5.

¹⁴ Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.39.

¹⁵ Subandi, *Ekonomi...* h. 40.

- b. Negara dengan pembangunan manusia menengah bila nilai HDI berkisar antara 0,51 hingga 0,78.
- c. Negara dengan pembangunan manusia tinggi bila nilai HDI berkisar antara 0,80 hingga 1,0.

Menurut Faisal Basri dan Haris Munandar, salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pembangunan manusia seutuhnya telah membuahkan hasil di suatu negara adalah Indeks Pembangunan Manusia (*HDI, Human Development Index*). Pada dasarnya HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang. Namun, HDI juga dipercaya sebagai pengukur efektivitas program dan kebijakan pemerintah terhadap kualitas penduduknya (negara kaya atau berpendapatan tinggi, negara berpendapatan menengah-atas, negara berpendapatan menengah-bawah, atau negara miskin alias berpenghasilan rendah).

IPM ini selanjutnya diadopsi oleh berbagai negara termasuk Indonesia, tentunya dengan melakukan berbagai modifikasi yang disesuaikan dengan ketersediaan data di negara masing-masing.

Dalam konteks Indonesia sendiri, perhitungan IPM meliputi 3 dimensi:

- a. Umur Panjang dan Hidup Sehat, dijabarkan menjadi angka harapan hidup saat lahir, diperoleh dari nominal angka tahunan harapan hidup minimum dan maksimum. Kedua angka standar tersebut masing-masing mencapai 20 tahun dan 85 tahun.
- b. Pengetahuan, dengan dua indikatornya yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah diperoleh dari nominal angka tahunan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS ini dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Setelah mendapat HLS selanjutnya dihitung Indeks HLS. Indeks HLS diperoleh dengan membandingkan angka terhadap angka standar UNDP yaitu minimum dan maksimum adalah 0 tahun dan 18 tahun. Sedangkan, Angka rata-rata lama sekolah diperoleh dari nominal

angka tahunan dan rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani, dengan asumsi bahwa umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Diperoleh, dengan angka nominal standar UNDP rata-rata lama sekolah dari 0 tahun (tidak/belum pernah sekolah) dan maksimal 15 tahun.

- c. Standar Hidup Layak, dijabarkan menjadi pengeluaran per kapita disesuaikan. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluarab per kapita dan paritas daya beli dengan rata-rata yang pengeluaran per kapita setahun yang diperoleh dari susenas, dibuat konstan dengan menggunakan tahun dasar 2012. Adapun batas minimum dan maksimum yang digunakan untuk penghitungan indeks pengeluaran per kapita setahun disesuaikan dengan masing-masing adalah 1 juta rupiah dan 26,6 juta rupiah.

Indonesia sendiri mempunyai pengukuran klasifikasi yang statusnya telah ditentukan berdasarkan kategorisasi UNDP. Klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Pembangunan manusia yang rendah bila dinilai HDI berkisar antara 0 hingga 60.
 - b. Pembangunan manusia bila nilai HDI berkisar antara 60 hingga 70.
 - c. Pembangunan manusia tinggi bila nilai HDI berkisar antara 70 hingga 80.
 - d. Pembangunan manusia tinggi bila nilai HDI berkisar antara 80 hingga 100.
3. Metode Penghitungan Index Komposit

Indeks pembangunan manusia mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup, diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, pengetahuan/tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antar angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama

¹⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, *Indeks Pembangunan...h.*
42.

sekolah (dengan bobot dua sepertiga) dan suatu standar hidup yang layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (PPP Rupiah).¹⁷

$$\mathbf{IPM = 1/3 (Indeks X_1 + Indeks X_2 + Indeks X_3)}$$

Dimana X_1 = Lamanya hidup, X_2 = tingkat pendidikan, X_3 = tingkat kehidupan

Index X_1 , Index X_2 , dan Index X_3 dihitung dengan formula:

$$\mathbf{Index X_{(i,j)} = (X_{(i,j)} - X_{(i-min)}) / (X_{(i-max)} - X_{(i-min)})}$$

Dimana: $X_{(i,j)}$: Indikator ke I dari daerah j (i=1,2,3
j=1,2...n)

$X_{(i-min)}$: Nilai Minimum dari X_i

$X_{(i-max)}$: Nilai maksimum dari X_i

4. Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Pertama-pertama kita perlu melihat hubungan antara konsep pembangunan manusia dan indeks pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia sangatlah luas-mencakup seluruh aspek kehidupan manusia-dari kebebasan mengungkapkan

¹⁷ BPS, Bappenas dan UNDP Indonesia, *Indonesia Laporan...*h. 201.

pendapat sampai kesetaraan jender, lapangan pekerjaan, gizi anak, sampai melek huruf orang dewasa. Sebaliknya, indeks pembangunan manusia mempunyai lingkup yang lebih sempit. Indeks ini hanya dapat mengukur sebagian saja dari keadaan pembangunan manusia, terutama karena banyak aspek dari kehidupan manusia, seperti kebahagiaan atau hubungan di dalam masyarakat tidak dapat diukur dengan angka. Oleh karena itu, pusat perhatian haruslah diletakan lebih pada konsep daripada indeksnya. Ini berarti dalam setiap aspek pekerjaannya pejabat daerah harus mendahulukan manusia –dengan menganggap manusia bukan sebagai sarana tetapi tujuan. Daripada mencoba mendidik orang dan menjaga kesehatan mereka agar tersedia angkatan kerja yang lebih baik, misalkan saja, atau mencoba meningkatkan kemakmuran ekonomi, lebih baik bila mereka berupaya membantu para bapak, ibu dan anak-anak warga masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih kaya dan membahagiakan. Jadi setiap kegiatan, entah itu investasi dalam membangun jalan, mengeluarkan ijin untuk usaha pembangunan, atau membangun fasilitas-fasilitas kesehatan baru, harus

bertujuan untuk memperluas pilihan yang tersedia bagi seluruh warga dan semuanya harus dilaksanakan secara setara dan berkelanjutan.

Indeks pembangunan manusia memberti petunjuk. Kesenjangan antara indeks terkini dan 100 mencerminkan “kekurangan” pembangunan manusia-jarak yang perlu ditempuh oleh setiap kabupaten. Perbandingan selama beberapa waktu akan memperlihatkan kepada kita kemajuan atau alokasi sumber daya-dan formula yang sekarang ada untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat memang telah memasukan IPM sebagai suatu indikator. Walaupun demikian, penggunaan IPM untuk tujuan-tujuan ini ataupun untuk tujuan-tujuan lainnya perlu dilakukan hati-hati. Jika kekurangan dalam suatu kabupaten adala dua kali lebih besar daripada kabupaten lainnya, maka pembangunan di kabupaten pertama tidak dengan sendirinya harus dua kali lebih besar daripada di kabupaten kedua.¹⁸

¹⁸ BPS, Bappenas dan UNDP Indonesia, *Indonesia Laporan...* h. 12.

C. Hubungan Variabel Antara Pengeluaran per Kapita dengan Indeks Pembangunan Manusia

Definisi Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi individu pada periode tertentu.

Setiap rumah tangga mempunyai klasifikasi pola konsumsi yang berbeda-beda tergantung dari hasil pendapatan yang diperolehnya dalam satu periode tertentu yang kemudian mereka belanjakan untuk keperluan masing-masing. Pola konsumsi seseorang atau rumah tangga pada dasarnya dikelompokkan pada dua bagian, yaitu konsumsi pangan dan bukan pangan. Penggunaan dari pendapatan yang diterima untuk keperluan memenuhi kebutuhan pangan dan bukan pangan, menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin besar pendapatan yang digunakan untuk membeli makanan, menunjukkan semakin rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan sebaliknya semakin kecil pendapatan yang digunakan untuk membeli makanan menunjukkan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pada tingkat pendapatan rendah konsumen perseorangan membelanjakan proporsi yang besar dari

pendapatannya untuk konsumsi. Bahkan dapat terjadi konsumsi lebih besar dari pendapatannya. Pada tingkat pendapatan rendah proporsi yang dibelanjakan untuk pangan tinggi. Pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi proporsi ini menurun, sedangkan proporsi pengeluaran untuk barang konsumsi lainnya naik.¹⁹ Persolaan inilah yang membuat tingkat kesejahteraan pada suatu daerah mengalami ketimpangan dan mempengaruhi *trend* indikator indek pembangunan manusia. Kesejahteraan yang tidak merata membuat sulit untuk menaikkan valuasi indek pembangunan manusia di suatu daerah.

Untuk mengukur mutu modal manusia United Nation Develpoment Program (UNDP) mengenalkan konsep mutu modal manusia yang diberi nama *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia. Kwik Kian Gie Kepala Bappenas, Sudarti Subakti Kepala BPS dan BO Asplund Kepala perwakilan UNDP menyepakati secara bersama dalam katalog resmi nasional yang menjadi naskah bersama ketiga lembaga (BPS, Bappenas dan UNDP: 2003).

¹⁹ Nursiah Chalid, "Pengeluaran Konsumsi...h. 35.

Pengeluaran per kapita merupakan salah satu indikator terciptanya pembangunan yang mampu mendorong pembangunan manusia. Sebagaimana yang telah di paparkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, dalam katalog resminya yang dipublikasi pada tahun 2004 walaupun ada perbedaan perhitungan antara LPM Global dengan BPS. LPM Global menggunakan PDB per kapita berdasarkan catatan keuangan nasional sedangkan BPS menggunakan konsumsi atau belanja rumah tangga berdasarkan survei rumah-rumah tangga sampel, yang mengungkapkan dengan lebih baik hal-hal nyata yang dialami oleh kelompok-kelompok berpendapatan rendah. Akan tetapi, semuanya bermuara pada satu tujuan yang salah satu tugas pembangunan terpentingnya adalah menerjemahkan pertumbuhan ekonomi menjadi peningkatan pembangunan manusia.²⁰

D. Penelitian Terdahulu

Tabel. 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Arfah Habib Saragih (2018)	Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	Penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. ²¹

²⁰ BPS, Bappenas dan UNDP Indonesia, *Indonesia Laporan...*h. 12.

²¹ Arfah Habib Saragih, "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia", *Jurnal, Economia*, Vol XIV Nomor 02 (Oktober, 2018), Universitas Indonesia.

2	Meri Lustianah (2016)	Pengaruh Alokasi Pro-Poor Budget terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai Variabel Moderasi Ditinjau dari Ekonomi Syariah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi pendidikan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dan alokasi kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. ²²
3	Indah Pangesti dan Rudy Susanto (2018)	Pengaruh Inflasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan yang negatif antara inflasi dengan indeks pembangunan manusia dengan kategori sedang dengan nilai koefisien korelasi sebesar -0,42 dan kontribusi yang diberikan inflasi terhadap IPM sebesar 17,64 %. ²³

²² Meri Lustianah, "Pengaruh Alokasi Pro-Poor Budget terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai Variabel Moderasi Ditinjau dari Ekonomi Syariah", *Jurnal, Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 1 Nomor 02 (Juli-Desember, 2016).

²³ Indah Pangesti dan Rudy Susanto, "Pengaruh Inflasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia", *Jurnal, Applied Bussines and Economics*, Vol V Nomor 01 (September, 2018), Universitas Indraprasta.